

## Analisis Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Komponen Coso-Integrated Framework ( Studi Kasus: Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir)

Fidia Wati<sup>1</sup>, Putri Kemala Dewi Lubis<sup>2</sup>, Uswatul Akmalia<sup>3</sup>,  
Mery Kristiani Susanti Simanjuntak<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan<sup>1,2,3,4</sup>

Email : [fdiawati2205@gmail.com](mailto:fdiawati2205@gmail.com)<sup>1</sup>, [uswatulakmalia3@gmail.com](mailto:uswatulakmalia3@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[merykristianisimanjuntak@gmail.com](mailto:merykristianisimanjuntak@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract** This study aims to analyse the effectiveness of the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) at the Tanjung Mulia Hilir Village Office. The method used is descriptive qualitative with the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) approach. Data was collected through interviews with the village secretary. The results showed that the Tanjung Mulia Hilir Urban Village Office has tried to implement ethical values and integrity, improve discipline through electronic attendance, and carry out main tasks and functions according to regulations. External supervision is carried out by the sub-district and neighbourhood security efforts through routine patrols. Internal communication makes use of instant messaging applications, while the community can submit complaints through the Head of Neighbourhood or the link provided. Community development and empowerment programmes are conducted through Musrenbangkel and the IPKK programme. Monitoring and evaluation is conducted through neighbourhood walkabouts. However, there is still a need to strengthen internal controls, optimise information technology, synergise empowerment programmes, and conduct more systematic monitoring and evaluation. With commitment and continuous improvement, it is expected that SPIP in Tanjung Mulia Hilir Village Office can realise effective, responsive, and public service-oriented governance.

**Keywords:** SPIP Implementation Effectiveness, Strengthening SPIP, Effective governance

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan sekretaris kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir telah berupaya menerapkan nilai-nilai etika dan integritas, meningkatkan disiplin melalui absensi elektronik, serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan. Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak kecamatan dan upaya pengamanan lingkungan melalui patroli rutin. Komunikasi internal memanfaatkan aplikasi pesan instan, sementara masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Kepala Lingkungan atau tautan yang disediakan. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui Musrenbangkel dan program IPKK. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kegiatan keliling wilayah. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek pengawasan internal, optimalisasi teknologi informasi, sinergi program pemberdayaan, serta pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis. Dengan komitmen dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan SPIP di Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

**Kata Kunci:** Efektivitas Implementasi SPIP, Penguatan SPIP, Tata Kelola Pemerintahan Efektif

### PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik memegang peranan krusial dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai entitas yang mengemban amanah publik, organisasi sektor publik dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan integritas tinggi dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat dan komprehensif mutlak diperlukan dalam rangka menjamin tercapainya

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral dan dinamis yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral yang dijalankan oleh seluruh komponen organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2013).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri dari lima unsur yang mengacu pada komponen pengendalian internal COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPIP juga menganut prinsip-prinsip pengendalian internal, antara lain adanya komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia, serta peran aparat pengawasan internal pemerintah.

Urgensi SPIP dalam organisasi sektor publik semakin nyata seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya SPIP yang efektif, organisasi dapat meminimalisir risiko terjadinya kecurangan (fraud), pemborosan (waste), dan penyalahgunaan wewenang (abuse). SPIP juga berperan vital dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lebih jauh, SPIP berkontribusi dalam menjaga dan mengamankan aset negara dari tindakan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Selain itu, SPIP juga menjadi instrumen penting untuk

memastikan kepatuhan organisasi terhadap berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, implementasi SPIP yang efektif akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Meskipun SPIP memiliki peran yang sangat strategis, faktanya implementasi SPIP dalam organisasi sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Permasalahan klasik seperti lemahnya komitmen dan *tone at the top* dari pimpinan, keterbatasan kompetensi dan integritas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung seringkali menjadi hambatan dalam penerapan SPIP secara efektif. Kompleksitas struktur organisasi dan dinamika perubahan lingkungan eksternal juga menuntut SPIP untuk terus beradaptasi dan berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi yang semakin kompleks. Hambatan lainnya yang tidak kalah penting adalah terbatasnya anggaran dan resources yang dialokasikan untuk pengembangan dan penguatan SPIP, sehingga implementasinya seringkali tidak optimal.

Implementasi SPIP memberikan banyak manfaat bagi organisasi pemerintah. SPIP yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi, mengurangi risiko kecurangan dan penyimpangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, implementasi SPIP juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala, seperti kurangnya komitmen pimpinan, keterbatasan kompetensi SDM, lemahnya koordinasi antar instansi, terbatasnya anggaran dan sarana prasarana, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (Zamzami & Faiz, 2015; Pratolo & Jatmiko, 2017).

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat SPIP dalam organisasi sektor publik. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan SPIP di lingkungan instansi pemerintah. Regulasi ini mengamanatkan setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menerapkan SPIP secara menyeluruh dan terpadu. Lebih lanjut, berbagai pedoman dan panduan teknis juga telah diterbitkan untuk membantu implementasi SPIP di lapangan, seperti Peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP serta Pedoman Penilaian Maturitas SPIP. Namun demikian, harus diakui bahwa regulasi dan pedoman saja tidak cukup, diperlukan juga upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh stakeholders untuk mengimplementasikan SPIP secara konsisten dan berkelanjutan.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin efektivitas SPIP. APIP merupakan lini pertahanan ketiga (*third line of*

defense) dalam model Three Lines of Defense yang berperan dalam memberikan penjaminan yang independen dan objektif atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi (IIA, 2013). Peran utama APIP dalam SPIP antara lain melakukan evaluasi dan pemantauan atas implementasi SPIP, memberikan konsultasi dan rekomendasi perbaikan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan perannya, APIP juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Keterbatasan kompetensi auditor, terbatasnya sumber daya, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum efektifnya tindak lanjut hasil pengawasan menjadi permasalahan yang sering dihadapi APIP (Kuntadi, 2019). Untuk itu, diperlukan strategi untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas APIP, antara lain melalui peningkatan kompetensi auditor, pemenuhan sumber daya yang memadai, optimalisasi teknologi informasi dalam pengawasan, serta penguatan sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait (Kuntadi, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi SPIP dalam organisasi sektor publik, khususnya di lingkungan instansi pemerintah daerah. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP, baik faktor enablers maupun faktor constraints, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi actual implementasi SPIP di lapangan. Penelitian ini juga akan mengkaji best practices penerapan SPIP yang telah terbukti efektif, sehingga dapat dijadikan benchmark dan pembelajaran bagi instansi pemerintah lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret dan aplikatif bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPIP, serta mendorong penguatan peran APIP sebagai lini pertahanan ketiga dalam menjamin efektivitas SPIP. Kontribusi penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait tema sistem pengendalian internal, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **METODE**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sebagai dasar untuk mengetahui efektivitas struktur pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan COSO atau sesuai dengan UU No.6 tahun 2008 pasal 3 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada kantor lurah Tanjung Mulia Hilir Kota Medan. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif sebagai dasar atau acuan untuk mengetahui efektivitas struktur pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan COSO (Committee of

Sponsoring Organization of the Tradeway Commission) atau sesuai dengan UU No.6 tahun 2008 pasal 3 pada Kantor Lurah Tanjung Mulia Hilir Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa wawancara dengan sekretaris desa mengenai struktur pengendalian internal di desa tersebut. Metode analisis diskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menerangkan data kemudian diolah sehingga dapat membuat suatu kesimpulan berdasarkan informasi data yang berhasil dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kantor Lurah Tanjung Mulia Hilir**

Kantor Lurah Tanjung Mulia Hilir berlokasi di Jl. Kawat VII No.1, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Kantor ini merupakan pusat administrasi kelurahan yang menyediakan berbagai layanan publik untuk masyarakat setempat, termasuk pengurusan dokumen kependudukan, surat keterangan, dan layanan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan administratif warga. Jam operasionalnya dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 pagi. Kantor ini berperan penting dalam membantu warga mengakses layanan pemerintahan dengan lebih mudah dan efisien.

### **Deskripsi Temuan Hasil Penelitian**

#### **1) Implementasi nilai-nilai etika dan integritas di kantor lurah Tanjung Mulia Hilir**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir telah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai etika dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai kelurahan dituntut untuk bertindak jujur dan sesuai dengan nilai-nilai baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan bahwa pegawai harus berakhlak dan melayani masyarakat dengan etis. Kesadaran akan pentingnya etika dan integritas dalam pelayanan publik telah tertanam dalam diri pegawai.

Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten. Informan menyebutkan bahwa etika pegawai masih tergantung pada individu masing-masing. Diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa seluruh pegawai menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap tindakannya.

#### **2) Penerapan disiplin kerja di kantor lurah Tanjung Mulia Hilir**

Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir telah menerapkan sistem absensi elektronik untuk memantau kedisiplinan pegawai. Setiap pagi dan sore, pegawai diwajibkan melakukan absensi melalui aplikasi yang dilengkapi dengan fitur foto dan lokasi. Sistem ini memastikan

bahwa pegawai hadir di kantor sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Plang penunjuk lokasi kantor juga dipasang untuk mempermudah verifikasi kehadiran pegawai.

Penerapan sistem absensi elektronik terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin pegawai. Namun, pengawasan tidak hanya sebatas pada kehadiran fisik, tetapi juga harus mencakup kualitas kinerja dan produktivitas pegawai selama jam kerja. Diperlukan mekanisme evaluasi kinerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa pegawai tidak hanya hadir, tetapi juga memberikan kontribusi optimal bagi pelayanan masyarakat.

### 3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kantor lurah Tanjung Mulia Hilir

Setiap pegawai Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah diatur dalam Peraturan Walikota. Tupoksi menjadi acuan bagi pegawai dalam menjalankan perannya masing-masing. Adanya kejelasan Tupoksi membantu pegawai untuk fokus pada tanggung jawab yang diembannya dan menghindari tumpang tindih pekerjaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan Tupoksi perlu dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik antar pegawai. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat seringkali membutuhkan penanganan lintas bidang. Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir perlu mengoptimalkan mekanisme koordinasi internal agar pelaksanaan Tupoksi dapat berjalan secara sinergis dan efektif.

### 4) Pengawasan dan pengendalian di kantor lurah Tanjung Mulia Hilir

Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir mendapatkan pengawasan secara berkala dari pihak Kecamatan. Informan menyebutkan bahwa Camat pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau kinerja kelurahan. Pengawasan eksternal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Selain itu, Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir juga melakukan upaya pengamanan lingkungan melalui patroli rutin setiap malam. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya kasus pembegalan di wilayah tersebut. Kehadiran petugas keamanan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Meskipun demikian, pengawasan dan pengendalian tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kelurahan semata. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menjaga keamanan lingkungan. Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir perlu terus mendorong keterlibatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan saluran komunikasi yang efektif.

### 5) Komunikasi dan penyampaian informasi di lingkungan kantor lurah Tanjung Mulia Hilir

Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir memanfaatkan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp untuk menyampaikan informasi penting kepada pegawai. Grup WhatsApp menjadi sarana komunikasi yang efisien dan real-time dalam koordinasi internal. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi secara langsung melalui Kepala Lingkungan (Kepling) atau tautan (link) yang disediakan oleh kelurahan.

Namun, pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan lebih lanjut. Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dapat mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan informasi kelurahan. Penyediaan layanan online dapat mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi. Selain itu, perlu ada sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait saluran komunikasi yang tersedia agar partisipasi masyarakat dapat lebih optimal.

#### 6) Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Tanjung Mulia Hilir

Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir memiliki program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel). Melalui Musrenbangkel, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan di wilayahnya. Kegiatan ini menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan.

Program pemberdayaan lainnya adalah Indikator Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan (IPKK). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir perlu terus mengoptimalkan program-program pemberdayaan agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada inisiatif kelurahan semata. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir perlu proaktif dalam menjalin kemitraan strategis guna memperluas sumber daya dan meningkatkan efektivitas program-program yang dijalankan.

#### 7) Pemantauan dan evaluasi di kantor kelurahan Tanjung Mulia Hilir

Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir melakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan keliling wilayah secara rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung kondisi di lapangan dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan bagi perencanaan dan perbaikan program kerja kelurahan.

Namun, pemantauan dan evaluasi tidak hanya dilakukan secara informal melalui kegiatan keliling. Diperlukan mekanisme yang lebih terstruktur dan sistematis, seperti

penyusunan laporan kinerja berkala, survei kepuasan masyarakat, dan audit internal. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara konkret untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja kelurahan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, seperti pengawasan internal, optimalisasi teknologi informasi, sinergi program pemberdayaan, serta pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis. Dengan komitmen dan perbaikan yang berkesinambungan, Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### 1) Aspek Kajian Teoretis

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) dalam menganalisis efektivitas SPIP di Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi (COSO, 2013). Komponen SPIP yang diteliti mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir telah berupaya menerapkan komponen-komponen SPIP sesuai dengan kerangka COSO. Lingkungan pengendalian dibangun melalui penerapan nilai-nilai etika dan integritas, serta peningkatan disiplin kerja. Aktivitas pengendalian dilakukan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan. Informasi dan komunikasi dijalankan dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pesan instan dan tautan pengaduan masyarakat. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan keliling wilayah secara rutin.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan SPIP di Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, seperti belum optimalnya pengawasan internal, terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang masih bersifat informal. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa implementasi SPIP di instansi pemerintah seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya komitmen pimpinan, keterbatasan kompetensi SDM, dan lemahnya koordinasi antar instansi (Zamzami & Faiz, 2015; Pratolo & Jatmiko, 2017).

## 2) Aspek Kajian Empiris

Penelitian oleh Leke et al. (2022) bertujuan untuk menganalisis lingkungan pengendalian Inspektorat Kabupaten Nagekeo dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian difokuskan pada lingkungan pengendalian yang dibangun oleh Pegawai Inspektorat Kabupaten Nagekeo sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Kategori penilaian lingkungan pengendalian digunakan sebagai alat pembandingan dan teknik deskriptif kuantitatif digunakan dengan pendekatan field research. Pemilihan sampel dilakukan melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, observasi, dan wawancara dengan fokus pada sub elemen pengendalian lingkungan dengan delapan variabel. Variabel tersebut mencakup menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang sehat, mewujudkan peran aparatur pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar variabel mendapat skor 2,25, namun dua variabel yang terkait dengan kebijakan penegakan hukum dan pengembangan sumber daya manusia tidak memadai dan memerlukan perhatian lebih, yaitu penegakan hukum integritas dan etika serta perumusan dan implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Temuan ini menyiratkan pentingnya memperkuat aspek penegakan hukum integritas dan etika, serta perumusan dan implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pengendalian internal. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sakti et al, (2022) yang bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal dan gaya kepemimpinan berperan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan perolehan data primer melalui kuesioner terhadap 40 karyawan PT Koperasi Manurung Palopo. Metode analisisnya menggunakan regresi linier berganda yang diproses dengan software SPSS 22. Hasil yang didapatkan adalah bahwa penurunan pengendalian internal dan gaya kepemimpinan dapat meningkatkan kemungkinan kecurangan, sedangkan peningkatan faktor-faktor tersebut dapat mengurangi kemungkinan perilaku kecurangan. Dalam penelitian tersebut, menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif dan kepemimpinan yang baik dalam mencegah terjadinya kecurangan,

Dalam penelitian Kesek et al. (2021), dilakukan analisis tentang pengaruh pengendalian internal serta budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Provinsi Sulawesi. Analisis data dilakukan dengan regresi berganda. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa budaya organisasi yang kurang kondusif menyebabkan kinerja karyawan menjadi menurun, dan sebaliknya. Selain itu, kuatnya pengendalian internal dalam suatu organisasi mengacu pada kinerja karyawan yang lebih baik, begitupun sebaliknya. Hal ini menyoroti pentingnya membangun budaya organisasi yang kondusif dan pengendalian internal yang efektif untuk mencapai kinerja yang optimal.

### 3) Aspek Implikasi Hasil

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dan teoretis bagi pengembangan SPIP di instansi pemerintah, khususnya di level kelurahan. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir untuk menyusun strategi penguatan SPIP, seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi dan kebijakan, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait. Penguatan SPIP diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait implementasi SPIP di instansi pemerintah. Temuan penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SPIP, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi penguatan SPIP yang efektif, serta mengeksplorasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam implementasi SPIP di berbagai konteks kelembagaan.

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi SPIP di Kantor Kelurahan X dengan menggunakan pendekatan teori COSO. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya penerapan komponen-komponen SPIP, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Temuan empiris penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Kantor Kelurahan X dan instansi terkait untuk melakukan penguatan SPIP secara berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur terkait implementasi SPIP di instansi pemerintah dan membuka peluang bagi penelitian lanjutan di masa depan

## **KESIMPULAN**

Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir telah berupaya menerapkan nilai-nilai etika dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, implementasinya masih perlu diperkuat melalui pengawasan dan penegakan aturan yang

konsisten. Penerapan sistem absensi elektronik terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin pegawai. Meskipun demikian, pengawasan tidak boleh hanya sebatas kehadiran fisik, tetapi juga harus mencakup kualitas kinerja dan produktivitas. Setiap pegawai memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang jelas sesuai Peraturan Walikota. Namun, pelaksanaan Tupoksi perlu dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama antar pegawai yang lebih optimal. Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir mendapatkan pengawasan eksternal dari Kecamatan dan melakukan upaya pengamanan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga perlu didorong. Pemanfaatan teknologi informasi seperti WhatsApp membantu dalam komunikasi internal, namun perlu dioptimalkan lebih lanjut melalui sistem informasi terintegrasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti Musrenbangkel dan IPKK telah dijalankan, tetapi perlu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan keliling wilayah, namun diperlukan mekanisme yang lebih terstruktur dan sistematis untuk menjamin peningkatan kinerja berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal control-integrated framework*.
- Institute of Internal Auditors (IIA). (2013). *IIA position paper: The three lines of defense in effective risk management and control*.
- Kuntadi, C. (2019). Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). *Jurnal Pengawasan*, 1(1), 1-10.
- Ompusunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 78-86.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Ns, A. S., & Kabib, N. (2020). Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam perspektif "COSO" di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(08), 1-11.
- Pratolo, S., & Jatmiko, B. (2017). Pengaruh karakteristik tata kelola korporat dan kualitas pengendalian internal terhadap kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1), 66-82.
- Setiyaviani, S. P. A., & Julian, L. (2023). Evaluasi lingkungan pengendalian dengan kerangka pengendalian internal COSO di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3350-3364.

Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2015). Evaluasi implementasi sistem pengendalian internal: Studi kasus pada sebuah perguruan tinggi negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 20-27.